

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Imigran menjadi momok masalah dalam berbagai aspek kehidupan negara-negara “Barat”. Imigran dipandang sebagai ancaman yang berpotensi membahayakan kedaulatan dan keamanan negara dalam berbagai aspek. Mencegah subjek yang dipandang sebagai ancaman untuk masuk ke negaranya, maka diberlakukan kebijakan perbatasan restriktif yang mana dalam penerapannya melanggar Hak Asasi Manusia dan juga melanggar prinsip *non-refoulement* dari Konvensi Pengungsi 1951. Salah satu negara yang menerapkan kebijakan perbatasan restriktif ini adalah Australia.

Australia bahkan dianggap sebagai negara yang paling ketat dalam kebijakan perbatasannya. Mulanya kebijakan perbatasan yang ketat ini diberi nama *Pacific Solution*, yaitu masa pemerintahan Mantan PM John Howard pada 2001. Kemudian kebijakan serupa diberlakukan lagi di era Tony Abbott pada 2013 yang diberi nama *Operation Sovereign Border*. Setelah kepemimpinan Abbott, kebijakan perbatasan restriktif tetap dilanjutkan oleh penerusnya yang juga berasal dari partai yang sama, Koalisi Liberal-Nasional, yaitu Malcolm Turnbull dan Scott Morrison.

Kebijakan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan prinsip dalam Konvensi Pengungsi 1951 ini tentunya menuai kritikan dari komunitas Internasional, namun negara Australia tetap menerapkannya dengan alasan melindungi kedaulatan dan keamanan nasional. Untuk meraih dukungan

masyarakat atas proposal kebijakan yang seperti ini, pemerintah menetapkan status imigran sebagai ancaman. Argument keamanan sendiri bergantung pada penerimaan audiens sehingga aktor keamanan perlu menonjolkan isu dengan pembentukan intersubjektif dan ancaman keamanan yang tepat.

Isu keamanan terhadap imigran di Australia dikisahkan dalam empat kiasan, pertama sebagai ancaman identitas budaya kolektif karena imigran dengan budaya asalnya dikhawatirkan membawa nilai-nilai yang berbenturan dengan nilai-nilai Australia. Kemudian kiasan kedua yaitu Imigran berpotensi sebagai ancaman nyata terhadap eksistensi Australia dilihat dari daerah asal para imigran yang umumnya berasal dari wilayah konflik, sehingga dikhawatirkan menularkan kekerasan di negara penerima yaitu Australia. Kiasan ketiga yaitu migran yang datang melalui perahu bukanlah pengungsi asli melainkan “pelompat antrian” yang mencari kehidupan lebih baik di negara penerima, merujuk pada dokumen pengungsi resmi yang dianggap sebagai “tiket”. Kemudian kiasan keempat yaitu migran yang datang melalui perahu dianggap sebagai bagian dari penyelundup manusia, baik itu sebagai anggota geng penyelundup maupun korban penyelundupan manusia.

Anggapan-anggapan diatas menjadi titik tolak pemberlakuan kebijakan keamanan perbatasan di Australia dengan alasan keamanan dan kedaulatan nasional, namun ada perbedaan pandangan antara dua kubu besar politik yang menjadi sentral pemerintahan Australia selama tiga dekade terakhir. Partai Koalisi memandang imigran sebagai ancaman, Partai Buruh justru memandang kebijakan perbatasan sebagai usaha mencegah para migran mati terombang ambing di laut, dengan harapan mereka membatalkan niat perjalanannya. Para migran yang

terlanjur tiba malah dibawa masuk, seperti yang dimuat oleh beberapa artikel berita, bahwa pada masa Buruh, terjadi lonjakan jumlah imigran. Perbedaan pandangan oleh dua partai besar di Australia ini membantah idiom Vandenberg bahwa “politics stop at the water’s edge”.

Perbedaan ini mengindikasikan isu imigran bukanlah tentang keamanan negara, melainkan isu yang dipolitisasi oleh Koalisi, yang dengan demikian Koalisi bisa dikatakan sebagai partai anti-imigran. Sikap dan retorika anti-imigran dikaitkan sebagai populisme sayap kanan, kanan ekstrim, ataupun Influencer sayap kanan. Populisme sayap kanan menetapkan negara sebagai suatu komunitas homogen dan menetapkan komunitas lain sebagai musuh dengan mendorong dikotomi identitas “we” dan “others”. Imigran dalam hal ini merupakan musuh yang berada dalam spektrum “others”.

Populisme sayap kanan oleh koalisi bisa dilihat dari representasi imigran oleh Koalisi itu sendiri, kemudian afliasinya dengan kelompok kelompok populis sayap kanan yang lain. Dari kepartaiannya, populis sayap kanan bisa dilihat dari narasi-narasi anti-imigran oleh para Perdana Menteri yang diusungnya, kemudian pejabat-pejabat pemerintahan pada masa pemerintahannya, dan retorika yang dimuat dalam situs resminya. Dalam hal afiliasi dengan partai, bisa dilihat kerjasama dan dukungan Koalisi untuk partai *One Nation* yang dikenal sangat kental isu populisme sayap kanannya. Terakhir bisa dilihat dari afiliasi Koalisi dengan media-media berita dan surat kabar yang mendorong isu serupa.

Para populis sayap kanan ini memanfaatkan emosi yaitu ketakutan untuk meraih dukungan masyarakat karena kemampuan ketakutan dalam mendorong

opini dan mengarahkan preferensi politik. Mengutip pernyataan Lynton Crosby, ahli strategi Koalisi pada era Howard, bahwa “*You can have a rational argument, you can have a rational position, but unless you make an emotional connection, you will rarely succeed*”²⁵⁸. Ketakutan disebarkan dengan memobilisasi momok bahaya dan ancaman yang ditimbulkannya sehingga menimbulkan kegelisahan masyarakat berkaitan dengan “apa yang akan terjadi” dan “apa yang bisa kita lakukan”. Para Sarjana Hubungan Internasional melihat kapasitas ketakutan sebagai sarana memobilisasi transformasi dalam tatanan politik, berdasarkan gerakan massa atau kerumunan karena kapasitas mereka untuk kekerasan, penularan emosional dan irasionalitas.

Saya menggunakan konsep *Politics of Fear* oleh Ruth Wodak untuk menganalisa penggunaan ketakutan dalam isu ini. *Politics of Fear* menurut Wodak adalah populis sayap kanan mempromosikan teori konspirasi yang liar untuk menciptakan ketakutan dan menyebarkan scenario apokaliptik dalam manifesto dan pidato, poster, debat, wawancara, media, dan berbagai jenis ekspresi lainnya, sementara di satu sisi mereka menciptakan harapan dengan dirinya sebagai penyelamat atas scenario apokaliptik tersebut. Wodak memetakan mindset populis sayap kanan yang membentuk dikotomi “*we*” (“*us*”, “*our*”) dan “*others*” (“*they*”, “*them*”, “*those*”, atau setidaknya istilah negative yang disematkan terhadap subjek rujukan). Kamus “*we*” mencakup komunitas bangsa yang homogen dengan segala penggambaran yang bagus, sementara “*others*” mencakup lawan dari “*we*” mencakup segala penggambaran yang buruk.

²⁵⁸ <https://www.cbc.ca/news/politics/canada-election-2015-conservatives-message-syrianrefugees1.3226039>

Wodak menjelaskan pemanfaatan ketakutan dengan empat asumsi, yaitu pertama, populis melakukan “*scapegoating*” yang menggunakan strategi pembalikan korban-pelaku dengan memberi label negatif terhadap subjek. Subjek yang menjadi target ditempatkan dalam posisi sebagai penyebab berbagai masalah dan kegelisahan yang meliputi masyarakat. Dalam hal isu imigran di Australia, label negatif ini meliputi ilegal, tidak teratur, tidak sah, ancaman budaya/identitas, teroris, penyelundup manusia. Narasi yang membentuk dikotomi “*we*” dan “*others*” digunakan untuk mengarahkan identitas kolektif sementara memberi tahu audiens mengenai siapa musuh.

Kemudian asumsi kedua yaitu populis sayap kanan menginstrumentalisasi menggunakan ketakutan untuk menciptakan harapan dengan membangun citra sebagai “penyelamat”. Populis sayap kanan menggunakan ketakutan untuk menekankan akuntabilitas politik. Dalam hal isu imigran di Australia, kebijakan perbatasan menjadi tolak ukur keberhasilan populis sayap kanan dalam tanggung jawab keamanan pada pemerintahannya. Ini dilakukan dengan menunjukkan performatifitas politiknya atau setidaknya menyudutkan politisi lain dengan menggambarkan politisi tersebut gagal memenuhi tanggung jawab keamanannya.

Asumsi ketiga yaitu populis sayap kanan menggunakan politik emosi dengan cara mendukung “*arrogance of ignorance*” yang berbanding pada rasionalitas, intuisi, kebencian, dan anti-intelektualisme yang menandai pergeseran ke politik emosi alih-alih bukti dan fakta. Dalam hal isu imigran di Australia, masyarakat tidak pernah secara langsung bertemu migran yang menggunakan perahu tersebut, melainkan hanya mengetahui dari penggambaran media. Padahal, migrasi dibangun sebagai ancaman oleh elit politik dengan

memberi label-label negatif, sementara media bertugas merepresentasikan ulang gambaran yang dibangun oleh elit politik. Interdependensi elit politik dan media dalam menggambarkan isu ini menanamkan asumsi pada masyarakat yang sama sekali mengabaikan fakta bahwa label-label negatif tersebut telah berkali-kali dibantah.

Terakhir, yaitu asumsi bahwa agenda populis sayap kanan mencapai arus utama politik, oleh karena itu kita dihadapkan pada normalisasi kebijakan sayap kanan yang meluas dan berkembang, dari topik, kata-kata yang sebelumnya tabu dan perilaku tidak sopan atau tidak tahu malu. Saat populis sayap kanan dengan representasinya berhasil mencapai arus utama, ini menunjukkan keberpihakan suara mayoritas terhadap isu-isu yang direpresentasikannya. Ini karena Perilaku pemilih didorong oleh sentimen, bukan nalar atau rasionalitas karena Keputusan dan pola tindakan tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari emosi. Sebagai buktinya menurut data, ketakutan publik berkaitan dengan migrasi tidak teratur cenderung berpihak pada Koalisi dan mayoritas warga Australia yang mendukung kebijakan perbatasan restriktif yang melanggar Hak Asasi Manusia dan prinsip dalam Konvensi Pengungsi 1951

Keberhasilan penggunaan ketakutan terhadap imigran di Australia membawa Koalisi menjadi partai paling sukses dalam pemilu. Koalisi berhasil menduduki posisi kepala pemerintahan dengan total waktu 2/3 tahun dalam tiga dekade terakhir. Sebagai tambahan menurut Wodak, di zaman dimana informasi menjadi terlalu cepat beredar, dibutuhkan "*reflektif deceleration*" yaitu refleksi kritis menantang strategi, keputusan, proposal dan kebijakan. Dengan demikian mendorong proses politik yang lebih rasional dan berbasis fakta.

5.2 Saran

Saat meneliti isu ini, penulis mendapati bahwa isu keamanan terhadap imigran yang dipandang sebagai ancaman tidak hanya terjadi di Australia. Imigran bahkan dikisahkan sebagai katalisator masalah di dunia “Barat” dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa negara yang dapat melakukan kecenderungan seperti Australia yaitu Polandia, Prancis, Jerman Amerika Serikat, Austria dan Hungaria. Untuk itu penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk membahas fenomena ini dalam spektrum Global, bukan hanya terikat pada satu negara.

